

ABSTRAK

Pandji Ndaru Sonatra, S331608011, 2019, Sistem Pengawasan Internal Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar Untuk Mewujudkan *Good Governance*. Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu kajian tentang pencegahan tindak pidana pungutan liar untuk mewujudkan *good governance* di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji permasalahan mengenai apa saja faktor yang menyebabkan tidak efektifnya sistem pengawasan dalam pencegahan tindak pidana pungutan liar di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mengkaji bagaimana solusi untuk menjawab tidak efektifnya sistem pengawasan yang ada saat ini dengan menciptakan suatu konsep lembaga pengawas independen baru untuk mewujudkan *good governance*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau nondoktrinal, data diperoleh langsung dari Inspektorat Kabupaten Sragen, Ombudsman Jawa Tengah, dan Satgas Saber Pungli Kabupaten Sragen. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak efektifnya sistem pengawasan dikarenakan, pertama tidak adanya pengawasan langsung pada saat proses transaksi antara pengguna jasa dengan petugas, kedua tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pungutan liar, ketiga kurang terkoordinasinya antara aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi pengawasan, dan keempat sistem pengawasan yang ada saat ini belum terbangun secara integral. Guna mencegah tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat maka diperlukan suatu solusi dengan menciptakan konstruksi model lembaga pengawas independen yang tugas pokok dan fungsinya adalah memberi pengawas administrasi langsung dalam semua kegiatan transaksional dalam segala urusan terkait dengan pelayanan publik di pemerintahan daerah.

Implikasi dari penelitian ini adalah konstruksi model sistem pengawasan independen ini diharapkan menjadi suatu terobosan progresif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pungutan liar guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan suatu kesejahteraan sosial dan berdampak positif dalam pembangunan ekonomi. Diciptakannya konstruksi model lembaga pengawas independen tersebut maka akan meningkatkan efektifitas dari sistem pengawasan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pungutan liar.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Pembaruan Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan.